

---

## Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat

Musniasih Yuniati<sup>1</sup>, Yorman<sup>2</sup>, Junaidi Ahmad<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Nahdlatul Wathan Mataram

E-mail: musniasih.y@gmail.com

---

### Article History:

Received: 28 Juni 2024

Revised: 15 Juli 2024

Accepted: 16 Juli 2024

**Keywords:** Pendapatan perkapita, harapan lama sekolah, IPM

**Abstract:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor faktor yang mempengaruhi IPM di Provinsi Nusa Tenggara Barat .Faktor faktor yang mempengaruhi IPM Nusa Tenggara Barat adalah faktor pengeluaran perkapita, angka harapan hidup, harapan lama sekolah, jumlah penduduk miskin, upah minimum provinsi. Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel, data time series tahun 2013-2022, data cross section laporan IPM. Hasil penelitian menunjukkan faktor pengeluaran perkapita, angka harapan hidup, harapan lama sekolah berpengaruh signifikan terhadap IPM Provinsi Nusa Tenggara Barat. faktor jumlah penduduk miskin, upah minimum provinsi tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM Provinsi Nusa Tenggara Barat. Implikasi dari penelitian ini adalah pentingnya usaha menurunkan angka kemiskinan dan menerapkan upah yang layak dan adil untuk semua penduduk di semua sektor agar tercapai tujuan pembangunan manusia yang berdampak pada kenaikan IPM.

---

## PENDAHULUAN

Berisi deskripsi tentang latar belakang permasalahan yang diselesaikan, isu-isu yang terkait dengan masalah yg diselesaikan, ulasan penelitan yang pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti lain yg relevan dengan penelitian yang dilakukan, serta didukung dengan *literature review* yang relevan. Referensi menggunakan *APA Style 6 th edition* dan penelitian ini menggunakan bodynote. (Times New Roman, size 12, Spacing: before 0 pt; after 0 pt, Line spacing: 1)

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan kepadatan penduduk yang tinggi. Dalam pemerinkatan dunia, jumlah penduduk Indonesia menempati urutan keempat setelah Amerika Serikat. Kepadatan penduduk yang tinggi mempunyai dampak positif dan negatif. Terdapat dampak positif terhadap ketersediaan tenaga kerja untuk memproduksi barang dan jasa serta ketersediaan pasar bagi barang dan jasa yang dihasilkan oleh tenaga kerja. Dampak negatif kepadatan penduduk menimbulkan kemiskinan dan berdampak pada berbagai permasalahan sosial. Menurut Adam Smith, dalam teori pertumbuhan klasik, pertumbuhan penduduk yang tinggi menurunkan tingkat aktivitas ekonomi karena setiap penduduk menjadi kurang produktif. Hal ini sesuai dengan pandangan David Richard dan Malthus yang menyatakan bahwa dalam

jangka panjang, perekonomian mencapai keadaan stabil. Jika pemerintah daerah dapat mengendalikan kepadatan penduduk, maka pembangunan daerah tidak lepas dari permasalahan kepadatan penduduk yang akan berdampak positif terhadap pembangunan daerah. Hal ini khususnya akan dilakukan melalui inisiatif pembangunan manusia.

Menurut Mill, ada dua unsur pembangunan ekonomi yang perlu ditingkatkan: peningkatan pengetahuan masyarakat dan perbaikan berupa upaya menghilangkan hambatan pembangunan seperti kepercayaan, adat istiadat, dan pemikiran tradisional Ya (Surya 2000). Laporan Pembangunan Manusia (1990) Pembangunan manusia adalah proses memperluas pilihan manusia dengan tujuan menciptakan lingkungan di mana orang dapat berumur panjang, sehat dan produktif. Indeks Pembangunan Manusia merupakan tingkat kinerja pembangunan manusia sebagai akibat dari kegiatan pembangunan yang dilakukan di suatu daerah. Semakin tinggi nilai IPM suatu wilayah menunjukkan pembangunan manusia yang semakin baik. Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang mengalami kemajuan pembangunan manusia saat ini. Berdasarkan data Indeks Pembangunan Manusia, IPM Nusa Tenggara Barat menempati peringkat ke-26 dari 34 provinsi di Indonesia. IPM Nusa Tenggara Barat mencapai 72,37% per kabupaten pada tahun 2023. Pada tahun 2020 hingga 2023, IPM Nusa Tenggara Barat meningkat sebesar 0,90% setiap tahunnya. Menurut BPS, banyak faktor yang mempengaruhi IPM suatu daerah. Rata-rata angka harapan hidup 85 tahun, angka melek huruf 100%, rata-rata lama sekolah 15 tahun, dan daya beli Rp 732.720. Rata-rata angka harapan hidup adalah 67 tahun, angka melek huruf 88,97 persen, rata-rata lama sekolah 13,96 persen, dan daya beli dalam pengeluaran per kapita dihitung sebesar Rp11.095.000 pada tahun 2023. Data yang disajikan, indikator IPM Nusa Tenggara Barat perlu ditingkatkan agar memenuhi standar BPS (BPS NTB,2023).

Oleh karena itu, ketika pemerintah daerah memprioritaskan langkah-langkah terkait pembangunan manusia, uji statistik harus dilakukan untuk mengetahui dampak dari masing-masing faktor, baik secara kolektif maupun individual. Konfigurasi HDI menggunakan angka harapan hidup untuk mengukur indikator kesehatan, harapan lama bersekolah untuk mengukur indikator pendidikan, dan pengeluaran per kapita negara, jumlah penduduk miskin, upah minimum untuk mengukur indikator hidup layak. Harapan hidup berpengaruh signifikan terhadap HDI pada HDI Sumatera Utara, yang menunjukkan bahwa lama sekolah tidak berpengaruh signifikan terhadap HDI (Asmawi, 2021).

Pengeluaran per kapita merupakan faktor yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM (Nofriyanti et.,al, 2021). Tingkat kemiskinan mempunyai pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap IPM di Kabupaten Tabalon (Rudy, et.,al, 2023). Sedangkan untuk faktor upah berpengaruh positif dan signifikan (Faizin 2021), dan upah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM di Jawa Tengah (Citra, et., al, 2021). Studi faktor dilakukan peneliti dengan memilih faktor-faktor yang dapat mempengaruhi IPM. Studi ini mengembangkan indikator hidup layak dengan tiga variabel: pengeluaran per kapita di suatu negara bagian, jumlah orang yang hidup dalam kemiskinan, dan upah minimum. Pengeluaran per kapita menunjukkan kemampuan memenuhi permintaan. Semakin tinggi pengeluaran per kapita maka semakin bahagia penduduk setempat karena mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Hal ini berdampak pada kualitas sumber daya manusia. Hal ini menunjukkan betapa banyak masyarakat yang tidak mampu memenuhi kebutuhannya kebutuhan pokok. Semakin miskin suatu kelompok tertentu dalam masyarakat, maka semakin rendah pula kompensasi yang diterima pekerja dan pemilik faktor produksi. Kualitas sumber daya manusia berkontribusi dalam penelitian ini karena digunakan untuk mengukur banyak keterkaitan, seperti tingkat pendapatan dan barang. Jika pengeluaran per kapita tinggi maka pendapatan juga dianggap tinggi karena sumber pengeluaran

per kapita adalah pendapatan. Dengan meningkatnya pendapatan, masyarakat membeli barang dan jasa yang menghasilkan pendapatan bagi pemilik faktor produksi, sehingga berdampak pada peningkatan kualitas sumber daya manusia yang menjadi tujuan pembangunan manusia. Jika pengeluaran per kapita mempunyai dampak yang signifikan terhadap HDI, penelitian ini menunjukkan bahwa upah minimum suatu negara bagian adalah tingkat upah yang ditetapkan oleh pemerintah negara bagian. Standar hidup yang memadai di daerah tersebut. Upah minimum biasanya dibayarkan di sektor formal atau kepada pemilik faktor produksi di perusahaan dan industri, sedangkan banyak penduduk NTB bekerja di sektor informal yang terkait dengan sistem penggajian sehingga sulit untuk menentukan dampaknya dan memerlukan pengujian statistik dan implikasi kebijakan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif yaitu penelitian dalam bentuk angka karakteristiknya dalam bentuk numerik (Wahyudi 2017). Populasi dalam penelitian ini adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat .Sedangkan yang menjadi sampel adalah Pengeluaran Perkapita, Angka Harapan Hidup,Harapan Lama Sekolah, Jumlah Penduduk Miskin, Upah Minimum Provinsi dan IPM.Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang berasal dari BPS. Metode analisis data menggunakan analisis regresi data panel .Data panel merupakan gabungan antara data lintas waktu (*time series*) dan lintas individu (*cross section*) .Data time series dalam penelitian ini adalah periode waktu penelitian yaitu 10 tahun (2013-2022) data cross section dalam penelitian ini adalah laporan IPM Provinsi NTB.Pengolahan data menggunakan SPSS versi 25 menghasilkan tabel correlation,model summery,anova,coeffisient.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

Indeks Pembangunan Manusia merupakan ukuran pencapaian pemerintah daerah dalam pembangunan manusia. Semakin tinggi nilai IPM semakin baik pencapaian pembangunan manusia. Banyak faktor yang menjadi indikator keberhasilan pembangunan manusia yang meliputi indikator pendidikan,indikator kesehatan dan indikator hidup layak. Dalam penelitian ini indikator pendidikan diukur dari harapan lama sekolah, indikator kesehatan diukur dari angka harapan hidup, indikator hidup layak diukur dari Pengeluaran Perkapita, Jumlah Penduduk Miskin,Upah Minimum Provinsi. IPM dan faktor yang mempengaruhinya akan diolah melalui SPSS versi 25 yang akan dilihat pengaruhnya secara statistik untuk menjawab tujuan penelitian dan akan dilakukan pembahasan secara lebih mendalam.

**Tabel 1. Tabel Correlation**

		Correlations					
		Y	X1	X2	X3	X4	X5
Pearson Correlation	Y	1.000	.976	.984	.974	-.902	.988
	X1	.976	1.000	.932	.924	-.928	.963
	X2	.984	.932	1.000	.956	-.873	.975
	X3	.974	.924	.956	1.000	-.823	.961
	X4	-.902	-.928	-.873	-.823	1.000	-.933

	X5	.988	.963	.975	.961	-.933	1.000
Sig. (1-tailed)	Y	.	.000	.000	.000	.000	.000
	X1	.000	.	.000	.000	.000	.000
	X2	.000	.000	.	.000	.000	.000
	X3	.000	.000	.000	.	.002	.000
	X4	.000	.000	.000	.002	.	.000
	X5	.000	.000	.000	.000	.000	.
N	Y	10	10	10	10	10	10
	X1	10	10	10	10	10	10
	X2	10	10	10	10	10	10
	X3	10	10	10	10	10	10
	X4	10	10	10	10	10	10
	X5	10	10	10	10	10	10

Tabel Correlation merupakan tabel yang menunjukkan tidak adanya hubungan antara variabel independent (multikolinieritas), penelitian yang baik adalah penelitian yang menunjukkan tidak ada hubungan antara variabel independennya. Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terdapat korelasi yang tinggi atau sempurna antar variabel independen (Ghozali, 2017). Pada tabel 1 semua variabel independen tidak mempunyai hubungan yang erat diantara sesamanya hal ini dapat dilihat dari nilai variabel yang lebih kecil dari 1. Angka 1 hanya terjadi pada hubungan variabel dengan dirinya sendiri. Nilai korelasi Person tidak lebih dari harga  $-1 \leq r \leq +1$  (Riduwan, 2010) Secara statistik ini menunjukkan diantara variabel independennya tidak terjadi multikolinieritas yang menjadi syarat dalam hubungan variabel independent. Berdasarkan tabel 1 diatas semua variabel independent seperti pengeluaran perkapita, angka harapan hidup, harapan lama sekolah dan upah minimum provinsi berkorelasi positif sedangkan jumlah penduduk miskin berkorelasi negatif. Ini berarti jika penduduk miskin meningkat maka IPM akan menurun sementara korelasi positif dapat diinterpretasikan jika Pengeluaran Perkapita Meningkat maka IPM akan meningkat, jika Angka Harapan Hidup meningkat maka IPM meningkat, jika harapan lama sekolah meningkat maka IPM akan meningkat, jika Upah Minimum Provinsi meningkat maka IPM akan meningkat.

**Tabel 2. Tabel Model Summary**

Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	1.000 <sup>a</sup>	.999	.999	.07243	2.512

a. Predictors: (Constant), X5, X4, X1, X2, X3

b. Dependent Variable: Y

Model Summary merupakan model yang menunjukkan besarnya pengaruh variabel independent terhadap variabel dependennya yang dilihat dari nilai R Squarenya. Berdasarkan tabel 2 nilai R Square dalam penelitian ini sebesar 0,999 ini berarti variabel Pengeluaran Perkapita, Angka Harapan Hidup, Harapan Lama Sekolah, Jumlah Penduduk dan Upah Minimum Provinsi berpengaruh terhadap IPM sebesar 0,99 persen sedang sisanya sebesar 0,01 pengaruh variabel lain yang tidak dihitung dalam model.

**Tabel 3. Tabel Anova**

		ANOVA <sup>a</sup>				
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	33.657	5	6.731	1283.310	.000 <sup>b</sup>
	Residual	.021	4	.005		
	Total	33.678	9			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X5, X4, X1, X2, X3

Tabel Anova menunjukkan adanya pengaruh secara serentak atau simultan variabel independennya terhadap variabel dependent, dengan melihat nilai signifikansi < 0,05. Berdasarkan tabel 3 tabel anova nampak nilai signifikansi 0,000 < 0,05 ini berarti Pengeluaran Perkapita, Angka Harapan Hidup, Harapan Lama Sekolah, Jumlah Penduduk Miskin, Upah Minimum Provinsi secara serentak berpengaruh terhadap IPM Provinsi NTB.

**Tabel 4. Tabel Coefisien**

		Coefficients <sup>a</sup>										
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations			Collinearity Statistics		
		B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partia l	Part	Tolera nce	VIF	
1	(Constant)	-18.750	9.587		-1.956	.122						
	X1	1.075	.149	.371	7.220	.002	.976	.964	.090	.059	16.944	
	X2	.947	.160	.380	5.907	.004	.984	.947	.074	.038	26.543	
	X3	.918	.279	.232	3.295	.030	.974	.855	.041	.031	31.773	
	X4	-4.370E-5	.003	-.001	-.016	.988	-.902	-.008	.000	.042	23.873	
	X5	.000	.001	.037	.275	.797	.988	.136	.003	.009	117.580	

a. Dependent Variable: Y

Tabel 4 menunjukkan bentuk persamaan model pengaruh faktor faktor terhadap IPM

Persamaan model IPM =  $-18.750 + 1.075 X_1 + 0.947 X_2 + 0.918 X_3 - 4.370 X_4 + 0,000 X_5 + e$

Berdasarkan persamaan model diatas nilai konstanta sebesar  $-18.750$  ini berarti Pengeluaran Perkapita, Angka Harapan Hidup, Harapan Lama Sekolah, Jumlah Penduduk Miskin, Upah Minimum Provinsi terhadap nilai IPM akan menurun sebesar  $18,750$ . Faktor Pengeluaran Perkapita memiliki koefisien regresi sebesar  $1.075$  ini berarti setiap kenaikan 1 persen maka IPM akan mengalami kenaikan sebesar  $1.075$ . Dengan asumsi semua faktor tetap. Faktor Angka Harapan Hidup memiliki koefisien regresi sebesar  $0.947$  ini berarti setiap kenaikan 1 persen maka IPM akan mengalami kenaikan sebesar  $0,947$  dengan asumsi semua faktor tetap. Faktor Harapan Lama Sekolah memiliki koefisien regresi sebesar  $0,918$  ini berarti setiap kenaikan 1 persen maka IPM akan mengalami kenaikan sebesar  $0,918$  dengan asumsi

semua faktor tetap. Faktor Jumlah Penduduk Miskin memiliki koefisien regresi sebesar -4.370 ini berarti setiap kenaikan sebesar 1 persen maka IPM akan mengalami penurunan sebesar 4.370 dengan asumsi semua faktor tetap. Faktor Upah Minimum Provinsi memiliki regresi sebesar 0.000 ini berarti setiap kenaikan sebesar 1 persen maka IPM akan sama dengan 0,000 dengan asumsi semua faktor tetap. Selanjutnya uji hipotesis t menunjuk faktor faktor Pengeluaran Perkapita, Angka Harapan Hidup, Harapan Lama Sekolah berpengaruh signifikan terhadap IPM hal ini dibuktikan dari nilai signifikant masing masing faktor yang lebih kecil dari 0,05 sedangkan faktor Jumlah Penduduk Miskin dan Upah Minimum Provinsi berpengaruh tidak signifikan terhadap IPM hal ini dibuktikan dari nilai signifikan kedua faktor yang lebih besar dari 0,05.

### **Pembahasan**

Berdasarkan hasil analisis data tentang faktor faktor yang mempengaruhi IPM Provinsi NTB faktor faktor Pengeluaran Perkapita, Angka Harapan Hidup, Harapan Lama Sekolah, Jumlah Penduduk Miskin dan Upah Minimum Provinsi secara simultan berpengaruh terhadap IPM Provinsi NTB hal ini mengindikasikan bahwa faktor faktor yang mempengaruhi IPM Provinsi NTB layak untuk di analisa lebih dalam lagi agar dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan manusia di Provinsi NTB. Disamping itu faktor faktor yang mempengaruhi IPM Provinsi NTB merupakan temuan dari penelitian ini

### **Pengaruh Pengeluaran Perkapita terhadap IPM Provinsi Nusa Tenggara Barat**

Berdasarkan hasil subtes , koefisien pengeluaran per kapita berpengaruh signifikan terhadap IPM Provinsi NTB. Hal ini disebabkan karena akses penduduk NTB terhadap gizi dan kesehatan memungkinkan mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup layak, dan semakin tinggi pengeluaran per kapita, maka semakin besar kemungkinan mereka untuk memenuhi seluruh kebutuhan dasarnya, yang menunjukkan bahwa penduduknya semakin kaya Oleh karena itu, kualitas sumber daya manusia akan meningkat sehingga berdampak pada IPM dan pengembangan sumber daya manusia. Hal ini sejalan dengan pendapat (Todaro M.P. 1999) yang menyatakan bahwa tujuan inti pembangunan manusia adalah kecukupan. Dengan kata lain, merupakan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar manusia secara umum seperti sandang, pangan, kesehatan, dan keselamatan. Jika salah satu dari kebutuhan tersebut tidak terpenuhi maka akan menimbulkan keterbelakangan absolut (Amartya Sen, 1979) menjelaskan bahwa pembangunan manusia terjadi ketika kebutuhan dasar dapat dipenuhi lebih baik dari sebelumnya. Temuan ini sejalan dengan penelitian bahwa pengeluaran per kapita mempengaruhi IPM di Sumatera Utara (Asmawani dan Eddy Pangidoan 2021). Hal serupa juga diungkapkan (Erly Novriyanti Manurung & Francis Hutabarat 2021). Pengeluaran per kapita mempunyai dampak yang signifikan terhadap HDI.

Dampak Angka Harapan Hidup terhadap IPM di Nusa Tenggara Barat Angka Harapan Hidup merupakan ukuran untuk menilai derajat kesehatan suatu penduduk. Apa yang dapat dicapai oleh rata-rata penduduk suatu wilayah merupakan indikasi dari kesehatan penduduknya, dan jika penduduk tersebut sehat maka dapat dengan mudah dimobilisasi untuk pembangunan yang berdampak pada peningkatan IPM. Penelitian (Boucekkine, Croix, dan Peeters 2007) menunjukkan bahwa peningkatan harapan hidup berarti lebih banyak waktu yang dihabiskan untuk pendidikan, yang memfasilitasi peningkatan pendidikan dan berperan langsung dalam mendorong pembangunan ekonomi. Hasil uji parsial menunjukkan bahwa angka harapan hidup mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap IPM di provinsi NTB. Hal ini menunjukkan



bahwa status kesehatan masyarakat semakin membaik, dan semakin baik kesehatan maka semakin tinggi produktivitas dalam kegiatan seperti produksi, yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Lebih lanjut, hasil penelitian (Irvana Arofah dkk. 2019) menunjukkan bahwa angka harapan hidup mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap IPM di Sumatera Utara.

### **Pengaruh Harapan Lama Sekolah Terhadap IPM Provinsi Nusa Tenggara Barat**

Lama bersekolah yang diharapkan adalah rata-rata lama pendidikan yang diharapkan dapat diselesaikan oleh penduduk suatu daerah. Pendidikan berperan penting dalam pembangunan daerah, terutama dalam menciptakan tenaga kerja terampil yang berdaya saing dalam perekonomian global (Ridwan 2016), namun pendidikan tinggi yang berkualitas tidak hanya menghasilkan lulusan yang berkualitas secara akademis; Semakin lama masa sekolah yang diharapkan, maka semakin banyak pula pengetahuan yang dapat diserap dan semakin baik pula kualitas hidup penduduknya. Semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin tinggi pula IPMnya. Hasil uji parsial menunjukkan bahwa faktor “harapan lama bersekolah” mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap IPM di Nusa Tenggara Barat. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk NTB mampu mencapai tingkat pendidikan yang cukup untuk berpartisipasi dalam pembangunan, termasuk produksi barang dan jasa yang menghasilkan pendapatan untuk meningkatkan kualitas manusia, demikian penelitian HDI (Erly Nofriyanti Manurung et.al 2021). Mereka menyatakan bahwa lama sekolah yang diharapkan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap HDI.

### **Pengaruh Jumlah Penduduk Miskin terhadap IPM Provinsi Nusa Tenggara Barat**

Jumlah Penduduk Miskin menunjukkan jumlah penduduk yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak. Menurut Amartya Sen dalam Bloom dan Canning (2001) seseorang dikatakan miskin bila tidak memiliki kesempatan dan rasa aman. Kemiskinan menunjukkan rendahnya kualitas hidup suatu masyarakat. Semakin banyak kelompok miskin di masyarakat semakin rendah kualitas hidup. Hasil uji parsial menunjukkan jumlah penduduk miskin tidak berpengaruh terhadap IPM Provinsi NTB ini mengindikasikan jumlah penduduk miskin tidak berkontribusi positif dalam pembangunan manusia sehingga tidak berpengaruh pada IPM NTB. Hal ini sesuai dengan penelitian (Rudy et.al 2023) menyatakan Tingkat Kemiskinan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap IPM kabupaten Tabalong tahun 2010-2020. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian (Srikasnelly et.al 2021) menyatakan variabel kemiskinan berdampak negatif terhadap IPM.

### **Pengaruh Upah Minimum Provinsi Terhadap IPM Provinsi Nusa Tenggara Barat.**

Upah adalah kompensasi yang diterima pekerja atas partisipasinya dalam proses produksi.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menetapkan upah minimum untuk menjamin masyarakat memenuhi kebutuhan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan untuk hidup layak, mencapai kualitas hidup, dan meningkatkan IPM. Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa upah minimum provinsi tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap IPM Nusa Tenggara Barat. Hal ini berbeda dengan hasil penelitian (Citra Islamiatus Izzah et.al 2021) menyatakan bahwa upah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM di Jawa Tengah. Lebih lanjut, penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang menemukan upah minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap HDI (Moh Faizin 2021). Menurut Dukcapil PMPD, kajian tersebut menunjukkan bahwa upah masyarakat NTB tidak ditentukan oleh upah minimum

negara. Sebab, upah minimum biasanya diberikan kepada pekerja sektor publik dan pekerja di daerah yang penduduknya bekerja di industri, sedangkan penduduk NTB. Kanwil NTB, Pada tahun 2023 mayoritas yakni sebanyak 970.560 orang akan bekerja di bidang pertanian dan peternakan.

Sektor ini umumnya tidak terpengaruh oleh upah minimum. Penelitian menunjukkan bahwa HDI di NTB lebih dipengaruhi oleh pengeluaran per kapita, angka harapan hidup, dan lama sekolah dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin atau upah minimum di negara tersebut. Temuan ini menunjukkan bahwa untuk mendorong pembangunan manusia, pemerintah NTB perlu mengurangi tingkat kemiskinan, mengurangi jumlah penduduk miskin, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Hal ini dapat dicapai dengan menciptakan lapangan kerja yang sesuai dengan keterampilan masyarakat dan meningkatkan keterampilan melalui serangkaian pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja. Profesi di bidang pariwisata berbasis kearifan lokal yang direkomendasikan adalah sebagai berikut: Domestikasi budaya, kerajinan, masakan, dan pengolahan sumber daya lokal menjadi industri dalam negeri dan memperkuat persaingan di tingkat global.

Selanjutnya, pemerintah daerah harus menciptakan upah yang adil dan memenuhi kebutuhan dasar seluruh masyarakat di segala sektor, guna meningkatkan daya beli masyarakat dan mensinergikan kegiatan perekonomian. Penelitian ini mempunyai keterbatasan dalam menentukan faktor. Artinya, anggaran negara di bidang kesehatan, pendidikan, dan penciptaan lapangan kerja tidak diperhitungkan, karena APBN menentukan pelaksanaan kegiatan pembangunan manusia. Selain itu, dipandang perlu untuk memasukkan koefisien inflasi yang mempengaruhi daya beli masyarakat dan merupakan ukuran pengeluaran per kapita.

## DAFTAR REFERENSI

- Abdullah Sani, Ridwan. (2016). *Penilaian Autentik. Jakarta. PT. Bumi Aksara*
- Adam, S. (2003). *Teori Pertumbuhan Ekonomi: Perencanaan dan Pembangunan. Jakarta: PT Raja Grafindo Pustaka.*
- Arofah, I., & Rohimah, S. (2019). Analisis jalur untuk pengaruh angka harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah terhadap indeks pembangunan manusia melalui pengeluaran Riil Per Kapita di Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Sainika Unpam: Jurnal Sains Dan Matematika Unpam*, 2(1), 76.
- Asmawani, E. P. (2021). Pengaruh Angka Harapan Hidup, Rata-Rata Lama Sekolah, Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengeluaran Perkapita Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Sains Ekonomi (JSE)*, 2(1), 96-109.
- Citra Islamiatus Izzah & Ignatia Martha Hendarti. (2021). Analisis pengaruh tingkat upah dan PDRB terhadap IPM Provinsi Jawa Tengah. *Oikos : Jurnal kajian pendidikan ekonomi dan ilmu ekonomi*, (2) 99-106. <https://journal.Unpas.ac.id>
- Darman, R., & Rahayu, D. (2023). Pengaruh Pendapatan Per Kapita, Tingkat Kemiskinan dan Tingkat Pengangguran terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Kabupaten Tabalong Tahun 2010-2020. *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan*, 6(2), 1176-1187.
- Ghazali, I., & Ratmono, D. (2017). Analisis Multivariat dan Ekonometrika: Teori, Konsep dan Aplikasi dengan Eviews 10. *Edisi Kedua, Yogyakarta: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.*
- Kasnelly, S., & Wardiah, J. (2021). Pengaruh Tingkat Pengangguran Dan Tingkat Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Indonesia. *Al-Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(II).



- Kerja, K. T., & Transmigrasi, R. I. (2003). Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. *Republik Indonesia*.
- Manurung, E. N., & Hutabarat, F. (2021). Pengaruh Angka Harapan Lama Sekolah, Rata-Rata Lama Sekolah, Pengeluaran per Kapita Terhadap Indeks Pembangunan Manusia. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Manajemen*, 4(2), 121-129.
- Pengaruh upah minimum, kemiskinan dan pengangguran pada IPM di kabupaten/ kota provinsi Jawa Timur.
- Riduwan, M. B. A. (2006). Belajar mudah penelitian untuk guru-karyawan dan peneliti pemula. *Bandung: Alfabeta*.
- Santika, S., Hanum, N., Safuridar, S., & Asnidar, A. (2022). Pengaruh Jumlah Penduduk, ANgka Harapan Hidup dan Rata-Rata Lama Sekolah terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Aceh Tamiang. *OPTIMAL Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 2(4), 250-260.
- Statistik, B. P., & Indonesi, S. T. (2021). IPM Badan Pusat Statistik 2020. *Mataram: BPS NTB*.
- Suryana, M. S. (2000). Ekonomi Pembangunan: Problematika dan Pendekatan.
- Todaro, M. P., & Smith, S. (2006). Pembangunan Ekonomi jilid 1 edisi kesembilan. Jakarta PT Aksara Pratama
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2006). *PEMBANGUNAN EKONOMI, edisi 9, jilid 1*. Erlangga.